

Airlangga Sering Ketemu Prabowo, Apakah Ini Tanda Bakal Koalisi?

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa beberapa waktu terakhir ini, ia ia sering bertemu dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ia juga tidak memungkiri bahwa pertemuannya dengan Prabowo turut membahas isu politik praktis. “(Bertemu) Pak Prabowo, ya tentu (membahas) politik yang praktis dan Indonesia ke depan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7).

Namun ketika ditanya soal arah koalisi Partai Golkar, Airlangga tidak menjawabnya secara lugas.

“Politik masih cair,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu singkat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Habiburokhan mengatakan bahwa Partai Golkar sudah mengusulkan nama Airlangga Hartarto untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan bakal RI-2 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tetap berada di tangan

Prabowo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Mungkin sekali sudah diusulkan (Airlangga bakal cawapres Prabowo), tapi tentu (belum) diputuskan. Sambil melihat dinamika lain, usulan-usulan lain,” ujar Habiburokhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (10/7).

Habiburokhan menegaskan bahwa Koalisi KIR terbuka dengan berbagai usulan. Termasuk, jika Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk jadi pendamping Prabowo.

“Silahkan usulan disampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk dipertimbangkan apakah akan disepakati atau tidak,” katanya.

Untuk diketahui, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, koalisi tersebut nampaknya mulai terpecah setelah PPP resmi menentang bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo. ● me

DPR Memasuki Masa Reses, 14 Juli hingga 15 Agustus 2023

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan bahwa seluruh anggota Dewan memasuki masa reses, perhitungan mulai 14 Juli hingga 15 Agustus 2023. Hal ini disampaikan Puan Maharani dalam pidato penutupan masa sidang V Tahun Sidang 2022-2023 di rapat paripurna, Kamis (13/7).

“Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat,” kata Puan dalam pidatonya, Kamis (13/7).

Lalu, Puan meminta semua anggota DPR tak berdiam diri saat reses. Masa reses harus digunakan semua anggota untuk turun ke masyarakat.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta anggota dewan menjelaskan apa saja tugas konstitusional yang sudah diselesaikan DPR. Tak hanya itu, Ketua DPP PDI-P ini turut meminta anggota DPR mempersiapkan rakyat dalam semangat gotong

royong demi membangun kemajuan Indonesia.

“Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” kata Puan.

Puan pun sempat menyuarakan berbagai tugas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Ia mengatakan, pada masa sidang ini, DPR telah menetapkan Undang-Undang (UU) Kesehatan dan Kesehatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa sebagai inisiatif DPR.

“Serta, merumuskan kebijakan kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Puan berharap, UU Kesehatan yang baru dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk revisi UU Desa diharapkan mampu memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat

desa sebagai subjek pembangunan. ● me

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN KERJA MAHFUD MD DI MAKASSAR

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD menyampaikan sambutan pada Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu saat kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Dalam kunjungannya Mahfud MD menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

Terdakwa Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Kembalikan Uang Rp27 Miliar ke Kejagung

Maqdir Ismail bawa tumpukan uang 1,8 juta dollar AS atau sekitar Rp27 miliar ke Kejagung. Uang tersebut dari kliennya, Irwan Hermawan.

JAKARTA (IM) - Maqdir Ismail, pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irwan Hermawan, akhirnya memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak

Nurhadi Diduga Menerima Uang Suap dan Melalui Anak dan Menantunya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi bahwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD), menerima uang suap dan gratifikasi melalui anak menantunya.

Dugaan itu kemudian dikonfirmasi penyidik KPK ke seorang saksi.

Adapun, saksi yang diduga mengetahui aliran uang ke keluarga Nurhadi yakni, pihak swasta, Paulus Welly Afandy.

KPK mengorek pengetahuan saksi Paulus Welly soal aliran uang yang diterima Nurhadi lewat anak

Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Maqdir datang dengan membawa dua tumpuk uang 1,8 juta dollar Amerika Serikat pecahan 100 dollar. Tumpukan uang dollar itu dibawa oleh dua orang assistennya. Uang tersebut diserahkan sebagai bentuk

recovery atas kasus yang menimpa kliennya.

Maqdir tiba pukul 10.20 WIB Kamis (13/7) dengan membawa 2 mobil putih. Uang sebanyak 1,8 juta US Dollar pecahan 100 dollar ada dalam koper ungu. Setelah di kejagung, uang tersebut dikeluarkan dari koper, lalu dibawa kedua asisten yang berjalan di kanan dan kiri Maqdir.

“Sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami Irwan, jumlah yang kami bawa 1,8 juta dollar amerika,” kata Maqdir di Kejagung,

Kamis (13/7).

Sebenarnya kedua asisten Maqdir yang dikerumuni para wartawan, sudah terlihat hati-hati saat membawa tumpukan uang dollar tersebut.

Namun entah kenapa, satu gepok dari tumpukan uang yang diduga hasil korupsi Irwan Hermawan dari proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terjatuh. Satu gepok uang tersebut diperkirakan sebanyak 1,496 Miliar.

Kemudian beberapa wartawan meneriaki. “Jangan diambil nanti ikut kecukid Kejagung,” disambut tawa jurnalis lainnya.

Maqdir mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari kliennya untuk diserahkan kepada penyidik Kejagung. Uang tersebut digunakan sebagai recovery atas kasus yang menimpa assistennya.

“Sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami irwan, jumlah yang kami bawa 1,8 juta dollar amerika,” kata Maqdir di Kejagung, Kamis (13/7).

Maqdir dipanggil jaksa penyidik terkait pernyataannya mengenai pengembalian uang senilai Rp27 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat oleh pihak swasta terkait perkara korupsi BTS 4G Kominfo.

Penyidik menilai pernyataan Maqdir tersebut menimbulkan polemik dalam penanganan perkara korupsi

BTS Kominfo di Kejaksaan, sehingga jaksa penyidik akan meminta keterangannya.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.

Enam dari delapan tersangka itu telah berstatus sebagai terdakwa yang kini dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) dari pihak PT Huwaci Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, dan mantan menkominfo Johnny G. Plate.

Sementara itu, dua tersangka lain yang masih dalam proses melengkapi berkas perkara ialah Winda Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan (IH) dan Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) sekaligus Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). ● han



KUNJUNGAN ANIES BASWEDAN DI MAKASSAR

Bakal calon presiden Anies Baswedan (kedua kanan) menyalami kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Kunjungan Anies Baswedan tersebut dalam rangka safari politik sekaligus menghadiri bimbingan teknis untuk anggota legislatif PKS se-Sulawesi.

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Yasonna: Kami Tak Bisa Memerintah DPR

JAKARTA (IM) - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset sampai sekarang belum juga dibahas DPR. Menteri Hu-

kum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly akan melobi DPR agar RUU tersebut segera dibahas.

Yasonna mengesankan

bahwa pemerintah tidak bisa memerintah Dewan DPR agar segera membahas RUU Perampasan Aset tersebut.

“Nanti kita cek lagi. Karena kami menunggu undangan dari DPR. Kita menunggu dari DPR,” ujar Yasonna saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7).

“Bagaimana kami melakukan. Kami tidak bisa memerintah DPR. Tapi kami akan lobi lah terus,” katanya Yasonna menambahkan.

Pemerintah akan bertemu dengan pimpinan DPR sebagai bentuk dari lobi yang

dilakukan. Selain itu, akan dilihat apakah sudah ada panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU Perampasan Aset.

“Kita nanti jumpai pimpinan, atau, sekarang kan apakah sudah ditunjuk pansus atau apa kan kita harus lihat dulu. Belum ada panggilan,” kata Yasonna.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana jika masa tugas DPR selesai pada 2024 tetapi RUU Perampasan Aset belum dibahas, Yasonna menegaskan bahwa RUU perampasan Aset akan diselesaikan.

“Ya kita selesaikan dong, itu prioritas kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan alasan kenapa Surat Presiden (Surpres) RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas dalam rapat paripurna DPR RI. Padahal, surpres itu sudah dikirim pemerintah dan diterima DPR RI pada 4 Mei 2023.

“Jadi seperti yang selalu saya sampaikan, DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya, setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata beritanya,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Jika ada RUU sudah diselesaikan, tiap komisinya baru dipersilahkan untuk membahas RUU yang baru.

“Jika komisinya dua (RUU) sudah selesai, silahkan menambah. Namun, jika belum selesai harus diselesaikan dahulu RUU tersebut,” ujar Puan. ● me

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARMADA BUMI PRATIWI LINES	
Dengan ini, Direksi PT Armada Bumi Pratiwi Lines, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin / 31 Juli 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022; 3. Pembahasan tanggung jawab (account of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Mohon kehadirannya tepat waktu.	
Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 14 Juli 2023 Direksi Perseroan PT Armada Bumi Pratiwi Lines	

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ARMADA MARITIME OFFSHORE	
Dengan ini, Direksi PT Armada Maritime Offshore, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin / 31 Juli 2023
Waktu	: Pukul 13.30 WIB – selesai
Tempat	: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022; 3. Pembahasan tanggung jawab (account of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Mohon kehadirannya tepat waktu.	
Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 14 Juli 2023 Direksi Perseroan PT Armada Maritime Offshore	

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PUTRA UTAMA LINE	
Dengan ini, Direksi PT Putra Utama Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin / 31 Juli 2023
Waktu	: Pukul 14.30 WIB – selesai
Tempat	: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022; 3. Pembahasan tanggung jawab (account of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Mohon kehadirannya tepat waktu.	
Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 14 Juli 2023 Direksi Perseroan PT Putra Utama Line	

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUKSES MARITIME LINE	
Dengan ini, Direksi PT Sukses Maritime Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin / 31 Juli 2023
Waktu	: Pukul 14.30 WIB – selesai
Tempat	: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022; 3. Pembahasan tanggung jawab (account of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Mohon kehadirannya tepat waktu.	
Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 14 Juli 2023 Direksi Perseroan PT Sukses Maritime Line	

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUKSES OSEAN KHATULISTIWA LINE	
Dengan ini, Direksi PT Sukses Osean Khatulistiwa Line, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin / 31 Juli 2023
Waktu	: Pukul 15.00 WIB – selesai
Tempat	: Sahid Sudirman Center Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Pemberian dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022; 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022; 3. Pembahasan tanggung jawab (account of de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022; 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023.
Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Mohon kehadirannya tepat waktu.	
Pemanggilan ini guna memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
Jakarta, 14 Juli 2023 Direksi Perseroan PT Sukses Osean Khatulistiwa Line	